

H A R I A N

LENTERA*Inspirasi Perubahan* **TODAY**HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN-JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
SurabayaOrang bahagia
merencanakan AKSI,
bukan HASIL

Dennis Wholey, Presenter

EDISI SELASA / 08 Desember 2020

**TEKA-TEKI BAKU TEMBAK
POLISI VS FPI**

SCAN ME

Dor!!! 6 orang tewas dalam baku tembak antara polisi dengan sekelompok pengawal Rizieq Syihab di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, Senin (7/12) dini hari. Semua korban berasal dari kubu Front Pembela Islam (FPI). Statmen berbeda pun muncul. Polisi menegaskan anggotanya diserang dan dipepet lebih dulu. Laskar FPI yang membawa senjata api dan senjata tajam sudah mendapat peringatan berupa tembakan ke udara serta roda kendaraan. Sebanyak 4 orang masih dalam pengejaran polisi. Bantahan pun langsung dilontarkan FPI yang menegaskan mobil Rizieq ditembak orang tak dikenal dan 6 anggota laskar diculik. Tak hanya itu, laskar FPI dikatakan tidak memiliki senjata api. Siapa yang benar? Sebagai negara hukum DPR RI dan Indonesia Police Watch (IPW) mendesak dibentuknya tim pencari fakta. Satu hal yang pasti, Rizieq Syihab kembali mangkir dari pemeriksaan polisi yang sudah 2 kali melayangkan panggilan.

Baca Hal 11

KRONOLOGI**1**

Tim Kepolisian menerima informasi adanya pengerahan massa saat Habib Rizieq Shihab (HRS) akan melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 7 Desember pukul 10.WIB

2

Tim kepolisian menyelidiki informasi tersebut dan membuntuti kendaraan yang diduga milik pengikut HRS

3

Sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Kendaraan tim kepolisian dipepet hingga terpaksa berhenti dan pengikut HRS menodongkan senjata pi serta senjata tajam pada tim kepolisian

4

Demi keselamatan tim kepolisian pun melakukan Tindakan tegas dan terukur. 6 orang dari 10 pengikut HRS tersebut tewas di tempat dan sisanya melarikan diri.

Peristiwa ini menyebabkan kerugian materil, yakni kerusakan kendaraan karena dipepet dan ditabrak. Terdapat pula bekas tembakan pelaku

PENGUMUNAN

Diberitahukan kepada pembaca setia Harian Lentera Today, pada Rabu (9 Desember 2020) kami tidak terbit karena Libur Nasional Pilkada 2020. Terbit kembali pada Kamis (10 Desember 2020). Update berita bisa terus diikuti melalui www.lenteratoday.com.

ASA VAKSIN KALA KASUS AKTIF MELESAT DAN RS PADAT

Jakarta - Kasus aktif virus corona (Covid-19) di Indonesia terus meroket akibat penambahan kasus baru yang agresif. Hal ini meningkatkan kekhawatiran karena tingkat keterisian rumah sakit makin padat dan tenaga kesehatan yang terbatas di Indonesia.

Di sisi lain, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech tiba di Indonesia. Harapannya, vaksinasi segera bisa dilakukan untuk mengakhiri pandemi ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada Senin (7/12), kasus aktif Covid-19 menembus 84.481 orang. Kasus aktif merupakan pasien Covid-19 yang sedang menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Kasus aktif ini juga merupakan rekor tertinggi di Indonesia, sejak penyakit mematikan ini mewabah. Adapun rekor yang dipecahkan merupakan kasus aktif yang terjadi sehari sebelumnya.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan bahwa bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 mencapai 57,97% per 1 Desember 2020. Provinsi dengan tingkat keterisian tempat tidur tertinggi adalah Jawa Barat.

Sebagai perbandingan, pada 1 Desember 2020, kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 72.015 orang, atau memiliki selisih 12.466 orang, dibandingkan dengan hari ini.

Sebagai informasi, pada hari ini kasus baru virus corona di Indonesia mencapai 5.754 kasus. Pertambahan kasus ini juga membuat total konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menjadi 581.550 orang. Kabar

baiknya, hari ini kesembuhan bertambah 4.431 orang sehingga total angka kesembuhan menjadi 479.202 orang. Sayangnya, kasus kematian masih bertambah 127 orang menjadi 17.867 orang.

Harus Diuji BPOM

Terpisah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang tiba kemarin malam, belum bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat. Vaksin harus melalui sejumlah tahapan uji di BPOM.

"Setelah mendapatkan izin dari BPOM, baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan, wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," ujar Jokowi dalam keterangan yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Sekretariat Presiden, Senin (7/12).

Untuk itu, vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu (6/12) malam, langsung dibawa menuju Kantor Pusat Bio Farma di Kota Bandung. Dari gudang di terminal kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, vaksin yang disimpan dalam tujuh enviro-tainer diangkut menggunakan tiga truk.

Beberapa waktu lalu, BPOM menyatakan kemungkinan mengeluarkan emergency use of authorization atau EUA untuk vaksin Covid-19 pada pekan ketiga Januari 2021. EUA adalah izin vaksin yang bersifat sementara dan bukan merupakan izin edar. EUA dikeluarkan BPOM dalam keadaan

darurat, seperti saat pagebluk Covid-19.

Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah sudah menentukan skema distribusi vaksin. Terawan mengklaim distribusi akan berjalan sesuai ketentuan distribusi obat. "Pelaksanaan distribusi vaksin sesuai dengan prosedur cara distribusi obat yang baik atau CDOP dalam rangka menjamin kualitas vaksin sampai diterima oleh masyarakat," katanya. Terawan mengatakan target pertama penerima vaksin akan difokuskan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan.

Kementerian Kesehatan RI menghabiskan anggaran Rp637,3 miliar untuk pengadaan 3,1 juta dosis vaksin pada Desember 2020. Pengadaan tersebut berasal dari dua perusahaan biofarmasi yang berbeda. Pemerintah baru mendatangkan 1,2 juta vaksin Covid-19 dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac.

"Saya sampaikan 2020 Kemenkes telah membelanjakan Rp637,3 miliar untuk pengadaan vaksin 3 juta dosis dari Sinovac dan 100 ribu dosis dari Cansino. Vaksin Sinovac yang dijadwalkan hadir pada desember dan akan berjalan seperti disampaikan," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sementara, untuk 2021 Menkeu menyiapkan anggaran Rp60,5 triliun untuk pengadaan dan distribusi vaksin corona atau covid-19 di Indonesia. "Total anggaran kesehatan mencapai Rp169,7 triliun (untuk 2021), di mana untuk pengadaan vaksin dan penanganan covid-19 sebesar Rp60,5 triliun," terangnya. (ist)

TETANG VAKSIN COVID-19 YANG AKAN DIGUNAKAN DI INDONESIA



Sinovac

- Menggunakan inactivated virus atau metode virus yang telah dilemahkan.
- Sinovac memicu antibodi usai empat pekan suntik.
- Namun, antibodi yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan antibodi pasien Covid-19 pasca sembuh.
- Harga per dosis vaksin Rp 200 ribu.

Pfizer

- Memiliki efektivitas 95 persen di hasil akhir uji klinis yang dilaporkan.
- Menggunakan teknologi baru mRNA dan perlu disimpan dalam suhu minus 70-80 derajat Celcius karena mudah degradasi.
- Perkiraan harga 20 US \$ per dosis

atau setara dengan Rp 283.120

- Pfizer mengajukan otorisasi darurat pada FDA Jumat lalu.
- Inggris menjadi negara pertama yang menggunakan Pfizer dengan izin emergency use of authorization (EUA).

Moderna

- Menggunakan teknologi baru mRNA.
- Hasil akhir uji klinis dilaporkan melebihi 90 persen.
- Tengah mengajukan izin penggunaan darurat ke FDA.
- Perkiraan harga \$ 10 - \$ 50 per dosis atau setara Rp 141 ribu - Rp 700 ribu per dosis.
- Amerika Serikat telah mengamankan 100 juta dosis untuk warganya dengan biaya \$ 15 per dosis atau di kisaran 200 ribu rupiah.

AstraZeneca

- Melaporkan efektivitas 70 persen di hasil awal uji klinis mereka.
- Tidak ada efek samping serius yang dilaporkan hingga saat ini. Hanya rasa nyeri sendi ringan di bagian suntikan hingga merasa kedinginan.
- Perkiraan harga di bawah \$ 4 per dosis atau Rp 56 ribu.
- AstraZeneca memiliki perjanjian \$ 1,2 miliar dengan pemerintah AS (300 juta dosis).

Sinopharm

- Harga mencapai Rp 2,1 juta untuk dua kali suntik.
- Menggunakan inactivated vaccine.
- Tidak ada efek samping serius yang dilaporkan dialami para relawan



Mensos Juliari Batubara resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi bansos corona

Jakarta-Desakan agar Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menggarong dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 diancam hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan pasal yang dijerakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri mengatakan publik dapat bersabar menunggu perkembangan hasil pendalaman kasus untuk mengetahui kepastian pasal yang digunakan.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan yang tercantum dalam sangkaan adalah Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Sementara ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) beleid tersebut.

"Kalau persangkaannya kemudian dakwaannya hanya terkait dengan Pasal 11 atau Pasal 12 ya enggak bisa kemudian dituntut dan dihukum mati, yang bisa kalau di sana ada penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/12).

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor itu berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Meski demikian, Arsul menyerahkan kewenangan untuk menggunakan beleid tersebut ke KPK. Hanya saja politikus PPP itu mengingatkan agar KPK melihat kembali konstruksi hukum bila ingin menggunakan aturan tersebut. "Kita juga jangan kemudian terbuai saja bahwa ini musti dituntut hukuman mati. Kita lihat konstruksi hukumnya, masuk apa tidak misalnya digunakan Pasal 2 UU Tipikor itu," tuturnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, penyebaran Covid-19 yang merupakan bencana non alam telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, untuk penanganan kasus tersangka Mensos Juliari Batubara dan pejabat di Kementerian Sosial lainnya, maka KPK tentu tidak akan berhenti hanya pada penerapan pasal-pasal

suap-menyuap.

KPK kata Firli akan bekerja secara maksimal untuk melihat adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi hingga berujung kerugian negara dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

Unsur-unsurnya kata Firli, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada Pasal 2 ayat (2) UU itu, lanjut Firli sangat memungkinkan penerapan pidana mati. Artinya kata Firli, terhadap tersangka Juliari dkk tidak akan berhenti hanya pada penerapan pasal-pasal suap-menyuap.

"Di dalam ketentuan UU 31 Tahun 1999 itu Pasal 2 tentang pengadaan barang dan jasa, ada ayat 2, memang ada ancaman hukuman mati. Kita paham juga pandemi Covid ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam nasional. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan," tegas Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (6/12).

Firli berharap, publik dapat bersabar menunggu perkembangan kasus Juliari dkk termasuk keputusan atas penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor. Musababnya, tim KPK masih dan akan terus berkerja untuk mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk bansos sembako maupun bansos lainnya dalam penanganan Pandemi Covid-19.

"Tentu nanti kita akan bekerja berdasar keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 tahun 1999. Saya kira, kita masih harus berkerja keras untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang merugikan uang negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 itu," ujarnya.

10 NEGARA YANG MEMBERLAKUKAN HUKUMAN MATI

1. China
China termasuk ke dalam 3 negara teratas yang memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati diberlakukan untuk pelaku kejahatan ekonomi dan politik, termasuk di dalamnya korupsi. Juga teruntuk pejabat yang terlibat dalam penyeludupan narkoba dan perdagangan manusia.

2. Iran
Secara terbuka Iran mengumumkan ada sekitar 400 orang yang dieksekusi. Namun tidak ada eksekusi pejabat publik Iran yang dilaporkan secara luas karena unsur kerahasiaan. Adapun kasus yang memberlakukan hukuman mati seperti penyeludupan, pemalsuan, berspekulasi dan mengganggu produksi pejabat.

3. Korea Utara
Korea Utara termasuk negara yang masih memberlakukan hukuman mati, namun sangat tertutup untuk pemberitaannya. Adapun kasus yang paling menarik perhatian adalah eksekusi paman Kim Jong Un, Chang Song-thaek, pada 2013. Kasusnya adalah dia dituduh melakukan korupsi.

4. Irak
Adapun kasus hukuman mati yang paling terkenal di Irak adalah kasus Ali Hassan al-Majid pada tahun 2010. Dia dihukum karena kejahatan kemanusiaan, serangan gas beracun di wilayah Kurdi pada tahun 1988.

5. Thailand
Di Thailand terdapat kebijakan memberlakukan hukuman mati bagi pejabat pengadilan, atau jaksa penuntut karena menerima atau menuntut suap. Pada tahun 2015, anggota parlemen Thailand mengamandemen UU Anti Korupsi memperluas hukuman mati kepada pejabat asing dan staf organisasi internasional yang melakukan suap.

6. Myanmar
Myanmar juga memberlakukan hukuman mati untuk kasus narkoba dan pengambilan untung pada layanan publik untuk pejabat publik.

7. Laos
Di Laos, bagi warganya yang terbukti mengganggu perdagangan, pertanian, atau kegiatan lainnya yang mengganggu ekonomi negara, akan di hukum mati. Termasuk di dalamnya kasus korupsi.

8. Pakistan
Menurut laporan hingga tahun 2015, Pakistan dilaporkan telah mengeksekusi mati sekitar 326 orang. Dari Amnesty International mengungkapkan 305 orang dieksekusi mati karena pembunuhan.

9. Amerika Serikat
Negara Adidaya Amerika Serikat juga mempunyai kebijakan hukuman mati. Salah satu kasus yang dijatuhi hukuman mati adalah pembunuhan.

10. Vietnam
Di Vietnam, jika warganya melakukan penggelapan kan dihukum mati bila korupsi di atas 300 juta atau korupsinya memiliki akibat yang serius. Juga pejabat yang melakukan perdagangan ilegal dan bernilai tinggi dan kasus-kasus serius yang berhubungan dengan negara akan dijatuhi hukuman mati juga.

Terpisah, Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji, Kalau memang dana bencana dikorupsi, jelas diancam dengan pidana mati. "Ditunggu nyali KPK untuk bertaji menginisiasi implementasi hukuman mati," katanya, Senin (7/12). (ist)

SURABAYA RENCANAKAN 'BLENDED LEARNING', 14 SMP SIMULASI SEKOLAH TATAP MUKA

SURABAYA - Sebanyak 14 sekolah jenjang SMP Negeri dan Swasta di Surabaya menggelar simulasi sistem pembelajaran Blended Learning, Senin (7/12). Kombinasi Proses Belajar Mengajar (PBM) melalui tatap muka di sekolah dan online ini dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan ideal di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan, simulasi ini adalah persiapan untuk sekolah tatap muka dalam masa pandemi Covid-19. Sebelum sekolah tatap muka resmi berjalan, maka diawali dahulu dengan simulasi. "Dengan harapan kami mendapatkan gambaran yang utuh apabila nanti sekolah dibuka dalam masa pandemi," kata Supomo saat meninjau simulasi PBM tatap muka di SMPN 1 Surabaya, Senin (7/12/2020)

Supomo menjelaskan, ada ketentuan-ketentuan yang dibuat di dalam proses belajar mengajar tatap muka pada masa pandemi Covid-19. Yakni, pelajar harus dalam kondisi sehat dan sebelumnya telah mengikuti swab dengan hasil negatif. Ketentuan ini berlaku pula bagi para guru maupun seluruh tenaga pendidikan yang hadir di sekolah.

"Kemudian ada persetujuan oleh orang tua. Jadi mereka semua (pelajar) yang datang di sekolah tatap muka harus mendapat persetujuan dari orang tua. Kemudian ada persetujuan dari komite sekolah dan selebihnya sarana prasarana protokol kesehatan harus disiapkan dengan kalkulasi jumlah murid yang datang," jelas dia.

Dalam melaksanakan simulasi sekolah tatap muka ini, pihaknya juga melibatkan lembaga di bidang kesehatan. Dengan harapan, mereka dapat memberikan masukan-masukan

agar proses belajar tatap muka di sekolah berjalan lancar dan mencegah penyebaran Covid-19.

Menurut Supomo, simulasi belajar tatap muka di sekolah ini rencananya dilaksanakan mulai hari ini Senin (7/12/2020) hingga 14 hari ke depan. Melalui simulasi ini, pihaknya berharap mendapat gambaran yang utuh secara natural ketika siswa mengikuti pembelajaran di sekolah.

"Misalnya ketika anak-anak keluar dari kelas maupun ke kamar mandi, kemudian ketika mereka istirahat di kelas. Sehingga kita dapat gambaran, dan apa yang kita lakukan ini agar benar-benar bisa mengendalikan penyebaran Covid," terang dia.

Dalam simulasi yang berlangsung di hari pertama ini, Supomo menyebut, diikuti sebanyak 14 sekolah SMP Negeri dan Swasta yang tersebar di lima wilayah Surabaya. Yakni Surabaya Barat, Pusat, Utara, Selatan dan Timur. Jumlah pelajar yang mengikuti pun terbatas dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah.

Sementara itu, Kepala SMPN 1 Surabaya, Akhmad Suharto menyatakan, simulasi pembelajaran tatap muka di sekolahnya hari ini berjalan lancar. Seluruh siswa yang hadir dalam kondisi sehat dan sebelumnya telah dilakukan swab dengan hasil negatif Covid-19. "Alhamdulillah berjalan lancar, seluruh siswa dalam kondisi sehat. Sebelumnya telah di-swab oleh Pemkot Surabaya. Yang mengajar juga guru-guru umurnya di bawah 50 tahun," kata Suharto.

Ia mengungkapkan, simulasi belajar tatap muka hari pertama ini diikuti sebanyak 18 pelajar kelas IX. Sementara bagi pelajar lain, mereka dapat mengikuti pembelajaran melalui online di rumahnya masing-masing.



Suasana simulasi sekolah tatap muka di SMPN 1 Surabaya, Senin (7/2)

"Dari seluruh siswa kelas IX sebanyak 405 anak itu materinya sama, antara yang berada di rumah dan sekolah. Jadi siswa yang berada di rumah juga menerima pembelajaran yang sama," ungkap dia.

Untuk mendukung pelaksanaan simulasi belajar tatap muka di sekolahnya, pihaknya juga menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan. Di antaranya, pengecekan suhu tubuh menggunakan thermo gun, bilik sterilisasi, tempat cuci tangan, penerapan jaga jarak di kelas, hingga akses jalan One Way atau satu arah. "Sarana dan prasarana (protokol kesehatan) sudah disiapkan Pemkot Surabaya. Hari ini mata pelajaran jam pertama 90 menit dan kedua 60 menit. Sementara ini tidak ada kendala apapun dan berjalan dengan lancar," ungkap dia.

Sebagai informasi, 14 lembaga pendidikan di Surabaya yang melaksanakan simulasi belajar mengajar tatap muka di sekolah itu terdiri dari 11 SMP Negeri dan 3 SMP Swasta. Rinciannya yakni, SMPN 1 Surabaya, SMPN 2 Surabaya, SMPN 3 Surabaya, SMPN 10 Surabaya, SMPN 12 Surabaya, SMPN 15 Surabaya, SMPN 19 Surabaya, SMPN 26 Surabaya, SMPN 28 Surabaya, SMPN 46 Surabaya dan SMPN 62 Surabaya. Sementara lembaga pendidikan swasta, terdiri dari SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, SMP YBPK 1 Surabaya dan SMP GIKI 2 Surabaya. (Ard).

GEGERA BAYAR UTANG, RI CETAK 'HATTRICK' PENURUNAN DEvisa

Jakarta-Cadangan devisa Indonesia kembali mengalami penurunan pada November 2020, meski relatif tipis. Namun jika melihat catatan, cadangan devisa sudah mencetak 'hattrick' alias menipis 3 bulan berturut-turut.

Pada Senin (7/12), Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa hingga akhir bulan lalu sebesar US\$ 133,6 miliar. Turun US\$ 100 juta dibandingkan Oktober 2020 yaitu US\$ 133,7 miliar. "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,9 bulan impor atau 9,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," sebut keterangan tertulis BI.

Perkembangan posisi cadangan devisa pada November 2020, lanjut keterangan BI, terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, penerimaan pajak dan devisa migas, serta pengeluaran untuk

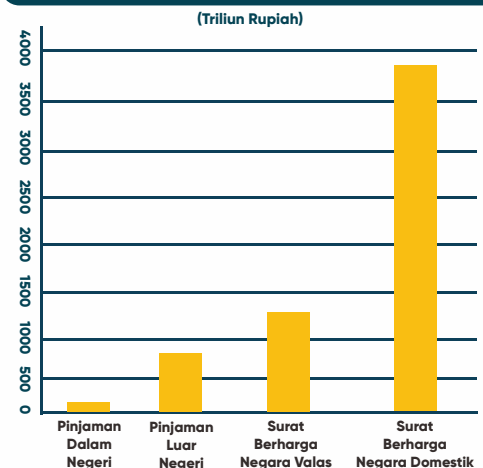
pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Dalam 2 bulan sebelumnya, cadangan devisa mengalami penurunan US\$ 1,7 miliar dan US\$ 1,8 miliar. Sementara pada Agustus, cadangan devisa mencetak rekor tertinggi sepanjang masa US\$ 137 miliar.

Pembayaran utang pemerintah masih menjadi pemicu penurunan cadangan devisa pada November. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan proyeksi utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2020 sebesar Rp 238 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo obligasi negara Rp 158 triliun dan pinjaman Rp 80 triliun.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,9 bulan impor atau 9,5 bulan impor dan pembayaran utang luar

POSISI UTANG PEMERINTAH PER OKTOBER 2020



Sumber : Katadata

negeri pemerintah. "Posisi tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," tulis Erwin dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (7/12). (Ist)

BAWASLU INGATKAN LAGI 49.390 TPS POTENSI RAWAN

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memetakan sebanyak 49.390 tempat pemungutan suara (TPS) memiliki kerawanan dalam sembilan indikator. Pemetaan kerawanan tersebut diambil dari sedikitnya 21.250 kelurahan dan desa di 30 provinsi (kecuali Provinsi Papua) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.

"Bawaslu merekomendasikan KPU untuk mengantisipasi kerawanan tersebut mengingat pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020," kata Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Senin (7/12).

TPS dengan kategori sulit dijangkau kondisi geografis, cuaca dan keamanan berjumlah 5.744 TPS. Lokasi tidak akses bagi pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.442 TPS. Kemudian, penempatan tidak sesuai standar protokol kesehatan berjumlah 1.420 TPS. TPS terdapat pemilih tidak memenuhi syarat yakni meninggal dunia, terdaftar ganda, atau tidak dikenali yang terdaftar di DPT berjumlah 14.534 tempat pemungutan suara.

TPS terdapat pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT sebanyak 6.291 TPS. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi berjumlah 11.559 TPS. Persoalan kendala aliran listrik di lokasi sebanyak 3.039 TPS. Penyelenggara pemilihan positif terinfeksi COVID-19 di 1.023 TPS.

Berikutnya, penyelenggara pemilihan tidak dapat daftar (log in) sirekap saat simulasi di 3.338 TPS. Selain itu, Bawaslu menertibkan sebanyak 409.796 unit alat peraga dan bahan kampanye di seluruh

daerah pilkada yang menyelenggarakan pilkada.

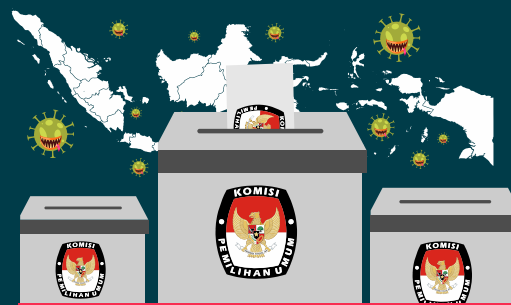
Jumlah TPS rawan yang terpetakan di atas belum termasuk daerah Indonesia Timur seperti Papua dan Papua Barat. Kondisi demikian disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet pada saat pengiriman data. "Pengambilan data pemetaan kerawanan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan selama 2 hari pada tanggal 5-6 Desember 2020," katanya.

Untuk mengantisipasi hambatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu merekomendasikan jajaran penyelenggara pemilihan menyiapkan aksesibilitas TPS dengan memastikan fasilitas di TPS memudahkan pemilih. "Khususnya penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil, dan pemilih rentan sebagainya," ujarnya. Lokasi TPS yang sulit dijangkau dan penempatan yang tidak akses menyulitkan pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya yang berujung pada kehilangan hak pilih.

Luncurkan Chatbot

Bawaslu pun sudah menggandeng WhatsApp untuk meluncurkan chatbot resmi Bawaslu jelang Pilkada 2020. Melalui chatbot ini masyarakat Indonesia dan staf Bawaslu dapat dengan mudah menyampaikan laporan pelanggaran konten internet terkait kampanye pilkada.

Mengutip siaran pers, Senin (7/12), chatbot resmi Bawaslu dibuat menggunakan fitur WhatsApp Business API. Fitur ini menyederhanakan mekanisme pelaporan, sehingga publik cukup menyimpan nomor chatbot Bawaslu (+62-811-1414-1414),



TPS RAWAN VERSI BAWASLU

- Sulit dijangkau kondisi geografis, cuaca dan keamanan : **5.744 TPS**
- Tidak aksesable bagi pemilih penyandang disabilitas : **2.442 TPS**
- Penempatan tidak sesuai standar protokol kesehatan : **1.420 TPS**
- Terdapat pemilih tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, ganda, atau tidak dikenali) terdaftar di DPT : **14.534 TPS**
- Terdapat pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT : **6.291 TPS**
- Kendala jaringan internet: **11.559 TPS**
- Terkendala aliran listrik: **3.039 TPS**
- Penyelenggara pemilihan positif terinfeksi Covid-19 : **1.023 TPS**
- Penyelenggara pemilihan tidak dapat daftar (log in) sirekap saat simulasi : **3.338 TPS**

lalu mengirimkan tautan dari konten internet yang dianggap melanggar aturan kampanye pilkada.

Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan kajian, lalu melaporkan dugaan pelanggaran kepada Facebook agar konten yang terbukti melanggar diturunkan dan dihapus. "Kami berharap chatbot ini dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan Pilkada 2020 berjalan aman, damai, dan adil," kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. (ist)

PILWALI BLITAR

DITUDING KAMPANYE TERSELUBUNG, POSKO ANGGOTA DPR RI DIGERUDUK POLISI-BAWASLU

BLITAR - Dituding menggelar kampanye terselubung pada minggu tenang Pilkada 2020, posko anggota DPR RI Komisi III Arteria Dahlan Center Blitar di Jl. Sultan Agung, Kota Blitar digeruduk polisi dan Bawaslu.

"Diceritakan Penanggungjawab Posko Arteria Dahlan Center Blitar, Ari Hadioanto kejadian yang sangat memalukan dan merugikan pihak Arteria ini berawal dari adanya kegiatan koordinasi dan konsolidasi internal PDIP, dengan mengundang pengurus ranting dan anak ranting se-Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. "Ini murni kegiatan partai, bukan kampanye. Karena yang hadir hanya pengurus ranting dan anak ranting dari Kelurahan Pakunden," ujar Ari dikutip Senin (12/7)

Lebih lanjut Ari mengungkapkan kronologis kedatangan 2 orang anggota intel Polres Blitar Kota, serta 3 orang Bawaslu Kota Blitar pada Minggu (6/12) sore. "Ketika acara sedang berlangsung, saya diberitahu ada 2 orang polisi dari intel Polres Blitar Kota datang," ungkapnya.

Kemudian ditemui dan dijelaskan Ari kalau ini acara konsolidasi internal partai,

bukan kampanye. Tapi kedua orang tadi tetap memaksa masuk, melihat dan mengambil foto. "Ketika kami tanya surat tugasnya juga tidak ada, kami keberatan dengan tindakan arogan dan premanisne semacam ini. Bahkan menanyakan mana calonnya," jelas Ari.

Ditandaskan Ari ada saksi sekitar 20 orang dari pengurus ranting dan anak ranting yang hadir, ini murni kader PDIP bukan masyarakat dan tidak ada paslon. "Ini menunjukkan polisi tidak paham hukum dan bertindak sewenang-wenang, ini rumah partai seharusnya mereka paham. Maka kami minta diusut, baik dari polisi dan Bawaslu serta polisi harus netral dan tidak memihak salah satu paslon," tandasnya.

Sementara Sekretaris Bersama Posko Arteria Dahlan Center, Joko Tri Asmoro mengatakan, "Kami juga sudah berusaha lapor ke Polres Blitar Kota, mengenai tindakan penyalahgunaan kewenangan. Tapi ditolak, dengan alasan hanya kesalahan pemahaman," tegasnya.

Rencananya setelah laporannya ditolak oleh Polres Blitar Kota, Posko Arteria



Penanggungjawab dan Sekretaris Posko Arteria Dahlan Center Blitar, saat memberikan keterangan pada wartawan

Dahlan Center akan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Propam baik Polda maupun Mabes Polri.

Secara terpisah Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko ketika dikonfirmasi kejadian ini membenarkan jika pihaknya mendatangi kegiatan di Posko Arteria Dahlan Center. "Iya memang benar kita datang, setelah mendapat informasi dari pihak polisi," kata Bambang.

Awalnya memang ada info kampanye pada masa tenang, sehingga Bambang menghubungi Panwascam dan ikut hadir ke lokasi. "Ternyata tidak ditemukan adanya kampanye, hanya membagi sembako dengan tulisan Arteria Dahlan bukan paslon dan mobil Branding paslon dari kabupaten. Jadi kami hanya menjalankan tugas pengawasan, mengecek kebenaran informasi yang diterima," paparnya. (Ais)

**MENUTUP TAHUN 2020
AFIFAH YUSUF RILIS ALBUM**

"Ketulusan Abadi"

Solois wanita Afifah Yusuf merilis lagu berjudul "Ketulusan Abadi" yang juga sekaligus menjadi rilisan terakhir di tahun 2020.

Mengusung musik bergenre pop dan folk, "Ketulusan Abadi" hadir berbeda dibandingkan lagu sebelumnya. Afifah di lagu ini mengajak pendengarnya untuk menyelami kompleksitas perasaan cinta dan mencintai.

"Perspektif dalam lagu ini sebenarnya tidak hanya terkotak-kotakkan pada satu perspektif saja. Perasaan cinta yang coba saya ceritakan dalam lagu ini lebih luas," kata Afifah Yusuf dalam keterangan resminya, Jumat.

"Bisa cinta dalam artian hubungan romantis bersama pasangan, bisa cinta antara seorang ibu atau orangtua kepada anaknya, atau bisa kepada siapapun kamu merasa menyimpan perasaan yang mendalam," sambung Afifah Yusuf.

Putri Hetty Koes Endang itu menjelaskan bahwa cinta tak selalu berisikan kata-kata indah atau perasaan berbunga-bunga. Akan tetapi, cinta yang disadari benar akan diuji berbagai rintangan dan membutuhkan pengorbanan untuk terus bertumbuh serta mendewasakan.

Perjalanan kreativitas lagu ini cukup sederhana, Afifah memulai penulisan lirik

dan penjahitan melodi sejak bulan Juli 2020 hingga diluncurkan akhir tahun ini.

Afifah juga melibatkan beberapa pelaku kreatif musik seperti Hezky Joe sebagai arranger, dan materi dimatangkan melalui proses editing, mixing, mastering oleh Rio Ndul dan Anggi Anggoro. Sementara itu, pembuatan video musik merupakan kolaborasi antara Afifah Yusuf, Rieska Paramita dan Sebastian Gary Sangitan (videographer).

"Saya berharap lagu ini dapat menghibur dan menemani para pendengarnya melewati akhir tahun 2020. Semoga para pendengar bisa turut merasakan apa yang ingin saya sampaikan. Bahkan bisa bertukar cerita mengenai arti ketulusan abadi bagi masing-masing orang, juga arti cinta, dan perasaan bahagia," kata Afifah Yusuf.

Sebelumnya, April lalu Afifah Yusuf juga meluncurkan lagu baru berjudul "Benua Berbeda" yang terinspirasi dari kisah cinta pribadinya.

Lagu "Benua Berbeda" terinspirasi dari kisah nyata pengalamannya menjalani hubungan jarak jauh, long distance relationship/LDR, dengan pasangan selama 4 tahun.

"Lagu ini pertama kali aku tulis di tahun 2017 waktu aku dan pasangan masih

menjalani hubungan long distance relationship, Indonesia-Amerika," kata Afifah waktu itu.

Afifah mengisahkan dia dan pasangan akhirnya berjumpa di musim panas terakhir sebelum akhirnya sang pasangan kembali selamanya ke Indonesia musim panas di tahun 2018.

"Momen-momen menunggu dan tidak sabar ingin bertemulah yang membuat mood dalam lagu ini tercurahkan dengan nuansa bahagia dan terkesan excited," tambah dia.

Afifah percaya bahwa tidak selamanya menjalani LDR harus selalu diselimuti dengan kegalauan dan kesedihan. Selain itu, lagu ini juga sangat relevan dengan kondisi pandemi sekarang, terutama bagi mereka yang sedang terpisah dari keluarga, pasangan, kerabat dan orang-orang terkasih.

Dalam proses produksi, Afifah Yusuf juga bekerja sama dengan Ari Renaldi sebagai penata musik sekaligus penggebuk drum, keys, percussions, dan loops, Topan Abimanyu (gitar), Rudy Zulkarnaen (bass), dan Wisnu Mawlana (terompet). Semua track di lagu ini direkam dan diproduksi di Aru Studio, Bandung, dan diproduksi oleh Afifah dan Amir Saatari dari Gaota Records sebuah label indie keluarga (Ant).



Ketulusan Abadi



TIDAK PERLU KHAWATIR JIKA PUNYA TETANGGA POSITIF CORONA

Bila Anda memiliki tetangga yang terinfeksi virus corona (Covid-19), maka tidak perlu khawatir, karena beberapa tips yang harus dilakukan agar tetap sehat.

Mengutip dari keterangan resmi, Kementerian Kesehatan, masker menjadi alat

pelindung bagi setiap orang agar tidak terinfeksi virus corona (Covid-19). Maka tetap kenakanlah masker saat berada di luar rumah. "Virus tidak bisa gelayangan dari rumah tetangga ke rumah Anda. Ingat, jarak 1,5 meter saja sudah cukup untuk menjauhkan Anda dari virus," seperti

dikutip (Sabtu, 5/12/2020).

Virus corona t berada di udara kalau ada orang terinfeksi yang bersin. Namun, keberadaan virus corona tidak akan lama bila di udara, sebab Covid-19 akan turun dan mengendap di permukaan benda-benda mati, tidak akan menyebar ke rumah Anda. (Ist)

BAGAIMANA SIKAP ANDA?

Jangan masuk ke rumah tetangga Covid-19 tanpa perlindungan memadai (masker). Selama Anda tidak masuk, Anda tidak akan tertular.

Kalau terpaksa masuk untuk memberi bantuan, pakailah masker, ditambah perlindungan lain yang bisa Anda dapatkan.

Lalu, segeralah ganti baju, mandi dengan sabun (keramas pakai sampo), cuci baju Anda tadi dengan sabun. Sabun akan membunuh virus yang menempel di tubuh Anda.

Tidak ada alasan untuk takut pada tetangga yang tertular Covid19. Berbuatlah sebisa Anda untuk membantu mereka.

BANTU DENGAN CARA INI

1. Sediakan makanan.
2. Bersihkan rumahnya dengan sabun atau disinfektan.
3. Jaga agar jangan ada orang masuk tanpa kepentingan dan tanpa pelindung.
4. Arahkan anggota keluarganya untuk melaksanakan tata cara isolasi pasien agar anggota keluarga lain tidak tertular.



Foto : CardMapr/Unsplash

YOUTUBE TAMBAH FITUR UNTUK BATASI UJARAN KEBENCIAN

YouTube menambahkan sejumlah fitur baru untuk membatasi peredaran ujaran kebencian di platform video tersebut.

"Kami selama ini fokus memperbaiki (fitur) komentar dengan tujuan membuat percakapan lebih sehat di YouTube," kata Wakil Direktur Manajemen Produk di YouTube, Johanna Wright, di blog resmi YouTube (Sabtu, 5/12/2020).

Fitur baru di Komentar atau Comments, YouTube akan memberikan notifikasi sebelum pengguna mengunggah tulisan tersebut, jika komentar yang diberikan mengandung kata-kata yang tidak sopan.

Cara ini, menurut YouTube, akan membuat pengguna berpikir ulang sebelum memberikan komentar yang kasar.

YouTube juga akan menguji coba fitur penyaring atau filter komentar di YouTube Studio, komentar yang mengandung kata-

kata kasar secara otomatis akan masuk ke peninjauan YouTube.

Peralatan untuk moderasi komentar juga akan diberikan kepada pemilik akun agar lebih mudah dijangkau.

YouTube juga akan memasang teknologi baru agar sistem mereka bisa lebih baik lagi dalam mendeteksi dan menghapus ujaran kebencian, platform milik Google ini juga akan meninjau topik video dan konteks komentar yang diberikan.

Awal Desember lalu layanan streaming YouTube meluncurkan panel informasi cek fakta di Indonesia, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Panel informasi cek fakta ini sebelumnya telah tersedia di Brasil, India, Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

"Ini adalah sebagai salah satu wujud dari komitmen YouTube untuk meningkatkan pengalaman mendapatkan berita, melawan

misinformasi dan disinformasi di platform," kata YouTube Indonesia.

YouTube mencatat, bahwa semakin banyak orang datang ke YouTube untuk mendapatkan berita dan informasi; baik mendapatkan kabar terbaru tentang suatu pemilihan umum, mendapatkan berbagai perspektif tentang suatu topik, atau mengetahui tentang peristiwa breaking news.

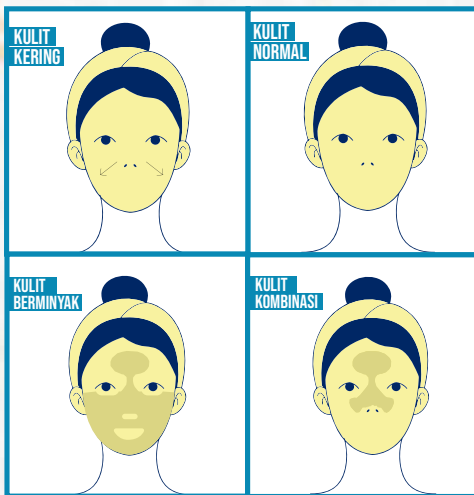
Lebih lanjut, waktu menonton konten seputar berita otoritatif meningkat lebih dari 75 persen selama tiga bulan pertama tahun 2020 di seluruh dunia.

"YouTube paham akan pentingnya memberikan informasi terpercaya dari sumber berita otoritatif kepada masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya selama beberapa tahun belakangan, kami terus bekerja keras untuk meningkatkan pengalaman penonton dalam mendapatkan berita aktual dan dari sumber otoritatif," kata YouTube Indonesia (Ant).

Foto : Andrey Zvyagintsev/Unsplash

KENALI JENIS KULIT WAJAH KAMU SEBELUM PAKAI TONER

Siapa yang tidak ingin memiliki kulit wajah yang mulus dan bebas dari permasalahan kulit wajah? Nah, setiap kulit wajah memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tentunya penanganannya juga berbeda. Jika kamu ingin menggunakan produk skin care seperti toner, kamu perlu untuk mengenali jenis kulit wajahmu terlebih dahulu agar tidak salah menggunakan produk skin care. Kamu sedang ingin mencoba toner untuk permasalahan kulit wajahmu? Yuk, kenali jenis kulit wajahmu terlebih dahulu.



KULIT KERING (DRY SKIN)

Jika kamu memiliki jenis kulit yang kering atau dry skin, kamu bisa menggunakan toner yang mengandung hyaluronic acid, memiliki kandungan lotion, dan hindari kandungan produk beralkohol karena akan membuat kulitmu bertambah kerinh.

KULIT NORMAL (NORMAL SKIN)

Nah, memiliki jenis kulit yang normal akan lebih mudah memakai produk skin care apa saja. Kamu bisa menggunakan produk hydrating toner yang memberikan efek menenangkan dan memiliki pH yang seimbang.

KULIT BERMINYAK DAN BERJERAWAT

Memiliki jenis kulit yang berminyak, tentunya akan lebih mudah berjerawat. Nah, jika kamu bisa menggunakan toner yang mengandung bahan aktif kontrol sebum, mengandung AHA untuk membersihkan pori-pori, dan zat anti bakteri.

KOMBINASI DAN SENSITIF

Jenis kulit ini rentan mengalami iritasi. Jangan gunakan toner yg mengandung alkohol, fragrance atau parfum. Gunakanlah toner yang mengandung pelembab dan menyegarkan, serta memiliki pH yang rendah.

FUNGSI TONER UNTUK KULIT

1. MENYEIMBANGKAN PH

Toner wajah dapat membantu menyeimbangkan pH di kulit. Tingkat pH merupakan indikasi dari keasaman kulit yang diukur dari skala 0 hingga 14, dengan skala 7 di tingkat yang netral.

3. MENYUSUTKAN DAN KENCANGKAN PORI

Toner wajah dapat mengencangkan pori-pori wajah, sehingga minyak dan racun yang berada dalam kulit menjadi lebih sedikit. Ini dapat membuat wajah lebih segar dan bersih, minyak berkurang, serta mencegah jerawat.

2. DETOKSIFIKASI

Toner wajah bekerja untuk menghilangkan racun lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan penampilan kulit. seperti asap, kabut, dan residu kimia lainnya dari kulit.

4. MENGATASI JERAWAT

Jerawat dapat menyebabkan rasa sakit dan wajah tak sedap dipandang. Dengan menghapus penumpukan minyak, residu, dan sel-sel kulit mati, toner wajah membantu mengurangi jumlah noda dan jerawat pada wajah serta cegah timbulnya jerawat. (1st)



Teka Teki Baku (dari hal 1)

Sebanyak 6 Orang anggota FPI tewas Tol Cikampek KM 50. Pihak Kepolisian menyebut 6 orang itu melakukan perlawanan mencoba menyerang petugas dengan senjata tajam dan senjata api. Saat itu anggota Polda Metro Jaya tengah mengawasi rombongan Habib Rizieq yang bergerak dari Sentul menuju Karawang. Rombongan ini dikawal FPI.

Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat itu mereka dipepet dan hendak diserang hingga akhirnya melakukan tindakan penembakan.

Sedang menurut FPI, mereka tak membawa senjata api dan senjata tajam. Lalu ada mobil yang mencoba mengganggu rombongan Habib Rizieq lalu melakukan penyerangan.

Terkait versi FPI dan Polda Metro ini, anggota Komisi III DPR dari F-Gerindra Habiburrokhman mengusulkan agar dibentuk tim investigasi khusus yang independen.

"Kami meminta dibentuk tim investigasi khusus yang independen terkait kasus penembakan di Cikampek. Investigasi khusus ini harus melibatkan Komnas HAM dan tidak ada intervensi dari pihak manapun," kata Habiburrokhman, Senin (7/12)

Hal itu menurut, Habiburrokhman, bertujuan agar tak ada tuduhan penghakiman kepada siapa pun selama investigasi berjalan. "Baik kepada kepolisian maupun kepada Habib Rizieq dan FPI serta pengikutnya. Kita berharap proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan,"

tutur Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu.

Lebih lanjut, ia menegaskan, sebagai anggota Komisi hukum DPR, ia akan terbuka menerima masukan apa pun dari masyarakat terkait insiden itu. "Sebagai anggota Komisi III kami membuka diri atas masukan informasi apa pun dari masyarakat terkait kasus ini. Insya Allah kami akan mengawal pengusutan kasus ini agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tegasnya.

Ke depan, Habiburrokhman mengaku akan mengusulkan pemanggilan Kapolri dalam rapat pengawasan di komisi III DPR. "Kami akan usulkan begitu," tutupnya.

Hal senada diungkapkan Indonesia Police Watch (IPW) yang mendesak pemerintah agar membentuk tim pencari fakta independen. "Police Watch (IPW) mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Independen untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Sebab antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui keterangan resmi, Senin (7/12).

Selain itu, kata Neta, terdapat sejumlah kelalaian yang dilakukan oleh aparatur Polri dalam melakukan deteksi dini terkait insiden tersebut. "Pertama, jika benar FPI mempunyai laskar khusus yang bersenjata, kenapa Baintelkam tidak tahu dan tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini serta tidak melakukan operasi persuasif untuk melumpuhkannya," ucap Neta.

Kemudian, lebih lanjut dia mempertanyakan apakah pengadangan rombongan FPI di wilayah tol tersebut sudah sesuai prosedur. Sebab, kata dia, polisi perlu membeberkan kepada publik bahwa benar

mereka ditembak terlebih dahulu sehingga melakukan tindakan tegas dan terukur.

Selain itu, jalan tol merupakan wilayah yang bebas hambatan sehingga polisi tak bisa mengadang penggunanya apabila tidak melanggar hukum. "Kecuali si pengendara nyata-nyata sudah melakukan tindak pidana," kata dia.

Bisa Dipanggil Paksa

Sementara itu, terkait mangkirnya kembali Rizieq dari panggilan polisi, Polri menyampaikan akan memberikan penindakan tegas kepada pimpinan Fornt Pembela Islam (FPI) ini. "Tadi sudah saya sampaikan, sudah jelas apa yang disampaikan bapak Kapolda Metro Jaya jadi tak perlu saya tambah. Jadi akhirnya akan menindak tegas agar HRS agar memenuhi pemeriksaan polisi. Sudah jelas tentunya nanti akan ada tindakan tegas kalau yang bersangkutan tidak hadir," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/12).

Awi menuturkan, polisi membuka kemungkinan akan melakukan tindakan akhir dengan menjemput paksa Habib Rizieq. Sebab, dikatakan Awi, menurut undang-undang, saksi wajib memenuhi panggilan polisi. "Tentunya tadi kita berharap kalau MRS gentle ya penuhi panggilan kepolisian, karena memang itu diatur dalam undang-undang di pasal 112 KUHP sudah jelas bahwa saksi itu wajib untuk hadir panggilan polisi. Sekali hadir dipanggil kedua kali, dua kali nggak hadir apa? Surat perintah membawa. Tentunya penyidik akan mengeluarkan itu," tuturnya.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Shihab 7 Desember 2020. Habib Rizieq akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Saya dan tim dari kuasa hukum Habib Rizieq Shihab telah datang mewakili Habib Rizieq Shihab bahwa Habib Rizieq dan Habib Hanif dalam hal ini ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dan diwakilkan oleh kita," kata pengacara Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar di Mapolda Metro Jaya.

Aziz Yanuar membeberkan alasan kliennya tersebut kembali tidak memenuhi panggilan kepolisian. Dia menyebut Habib Rizieq Shihab masih dalam proses pemulihan. "Beliau sedang masih pemulihan sembari ada keperluan keluarga yang memang tadi malam sudah dilaksanakan saat masih bersama dengan keluarga," ungkap Aziz.

Aziz juga menjelaskan pihaknya tidak melampirkan surat keterangan dari dokter terkait kondisi Habib Rizieq tersebut. Sebab menurut Aziz Yanuar, Habib Rizieq tidak sakit, melainkan masih pemulihan. "Beliau tidak sakit artinya pemulihan saja. Kita harus jujur apa adanya. Kalau sakit nanti beliau tidak sakit. Tapi kondisinya kelelahan sehingga membutuhkan istirahat," ujar Aziz.

DERETAN PENYIDIKAN PELANGGARAN RIZIEQ

26 NOVEMBER 2020

Polda Jabar menaikkan status ke penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Rizieq di Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markaz Syariah DPP FPI, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jumat 13 November 2020.

Polda Metro Jaya menaikkan status ke penyidikan perkara pelanggaran protokol kesehatan pada acara Rizieq di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu 14 November 2020.

27 NOVEMBER 2020

Polresta Bogor Kota menaikkan kasus swab test Rizieq di RS UMMI Bogor ke tahap penyidikan karena diduga menutupi hasil swab di tenagh Pandemi Covid-19

7 DESEMBER 2020



PAK JOKOWI, DESAKAN RESHUFFLE KABINET MENGUAT

Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dan tak bisa menutupi rasa kecewa setelah dua anak buahnya di Kabinet Indonesia maju 'dicituk' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliani P Batubara sama-sama terjerat suap. Edhy menjadi tersangka suap pengurusan ekspor benih lobster, sedangkan Juliani menjadi tersangka suap paket sembako bansos Covid-19. Ironis!

Desakan agar ada reshuffle kabinet pun makin menguat. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju urgen dilakukan. Hendri menyebut, reshuffle mendesak karena menteri koordinator tak mungkin lama-lama menjabat sebagai menteri ad interim. Harus ada menteri definitif yang ditunjuk untuk menggantikan menteri yang terjerat kasus hukum.

Momentum ini, kata Hendri, justru bisa digunakan Jokowi untuk melakukan perbaikan kinerja di kabinetnya yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun ini. "Enggak usah ada penangkapan menteri oleh KPK pun kalau presiden mau reshuffle ya dia reshuffle, sebenarnya kalau reshuffle kan kebutuhan dari presiden aja," ujar dia Senin (7/12).

Terkait dengan pengganti Edhy Prabowo dan Juliani Batubara, Hendri memprediksi, sosoknya bisa berasal dari profesional, profesional yang dekat dengan partai politik, atau masih kader partai. Untuk kursi Menteri Sosial, Hendri memprediksi diisi kader Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, atau Golkar.

PAN diperkirakan akan diberi kursi menteri karena manuvernya beberapa waktu belakangan yang seolah menunjukkan kedekatan dengan Jokowi. Kemudian, untuk kursi Menteri Kelautan dan Perikanan, diperkirakan Jokowi akan menunjuk kalangan profesional yang dekat dengan partai atau kader partai seperti PDI-P, Gerindra atau Golkar. "Jika (yang ditunjuk) Golkar mungkin ada rasa terima kasih Pak Jokowi kepada Menteri Airlangga (Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian dan Ketua Umum Golkar) setelah meloloskan UU Ciptaker mungkin ditukar posisinya," ujar Hendri.

Netizen pun ikut bersuara terkait kondisi ini. Pemilik akun @wibiisono bilang, "Udh 2 menteri lho pak, yakin nggak mau reshuffle? Komentar itu ditautkan pada unggahan Jokowi yang berisi komentarnya saat Juliani menjadi tersangka KPK.

Kemudian ada juga pemilik akun @rabellidp yang bilang, "gak kecewa pak dengan pilihan menteri di periode ke 2. Akibat kontrak politik. Semoga dpt pengganti yg lebih baik lagi pak."

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Jokowi

memiliki tiga skenario reshuffle. Pertama, pengganti dua menteri tetap diberikan ke Partai Gerinda dan PDI Perjuangan. Skenario Kedua, dua kementerian itu diberikan kepada pihak lain, bisa dari parpol koalisi lain atau kalangan profesional non-parpol. Namun, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tetap dapat slot di kementerian lain.

Skenario ketiga, kata Adi, posisi dua kementerian itu diberikan ke pihak lain dengan mengurangi jatah kursi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. "Tapi skenario ini beresiko menimbulkan gejolak, terutama PDI-P sebagai partai pemenang pemilu. Karenanya, skenario ini sulit diwujudkan," kata Adi. (ist)

KEPUASAN TERHADAP KINERJA MENTERI

Dirilis Oktober 2020

